

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, H. Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andasmita, Komar. 1990. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasan*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar.
- Arikuntoro. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rianeka Cipta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisasi KUHPerdara dan Perkembangannya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syajarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hadikesuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Joko Subagyo, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Trisnaningsih, Moediarti. 2008. *Beberapa Persoalan dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Manunggalling Kawulangusti.
- Thalib, Sayuti. 2014. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.

- Saleh, K. Wantjik. 1980.*Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrani, Riduan. 2010.*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1998.*Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press.
- MD., Mahfud. 2010.*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2022.*Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. 2008.*Hukum Orang dan Keluarga Pohan*. Surabaya: UNAIR.
- Soejendro, J. Kartini. 2005.*Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*. Jogjakarta : Kanisius.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004.*Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedharyo. 2004.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2001.*Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Yunanto. 2010.*Hukum Perkawinan Indonesia: Kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

## **Jurnal**

- Dwinopianti, Eva. 2017. "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2, Universitas Islam Indonesia,

- Istriyanti, Annisa. 2015. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Privat Law*, Vol. III No.2.
- Rahman, Faiz dan Dian Agung Wicaksono. 2016. “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Yunanto, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.3 No.1, 2018, hlm. 262.
- Yunanto, “Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum Dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Perkawinan Serial”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 4, 2018, hlm. 388

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang nomor 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Undang – Undang nomor 8 tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan

Undang – Undang nomor 11 tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan

Undang – Undang nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang – Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Surat Edaran Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan